

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN LAUT UNTUK MENUNJANG KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA

Dewi Wuryandani*
Hilma Meilani**

Abstract

Fishery potential in this republic is very abundant in inland waterways and at sea, but until now has not been used optimally for the welfare of the people. Increased exports of fishery products has increased along with increasing the standards required, both for fishery products in the country and abroad who want quality and quality assured. Some classical problems often faced by this nation as production costs are still high, weak capitalization, poor fish farming skills, a good seed, feed, disease, environmental management and post-harvest cultivation. In addition, with an increasingly open market in each country becomes a challenge for the national fisheries development. If this issue is not addressed, it is not possible to inhibit the increasing competitiveness of fisheries sector in the future.

Kata kunci: Produksi, Pengelolaan Perikanan, kebijakan pemerintah.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977mil antara Samudera Hindia dan Samudra Pasifik. Apabila perairan antara pulau-pulau itu digabungkan, maka luas Indonesia mencapai 5.180.053 km² yang terdiri dari 1.922.570 km² berupa daratan dan 3.257.483 km² berupa lautan. Jika dibandingkan antara luas daratan dan lautan, maka luas lautan di Indonesia mencapai 62% dari total wilayah Indonesia sedangkan luas daratan hanya 37% dari total wilayah Indonesia¹.

* Penulis adalah Kandidat Peneliti bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik di P3DI Setjen DPR RI dapat dihubungi di ummu_rizky@yahoo.com.

** Penulis adalah Kandidat Peneliti bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik di P3DI Setjen DPR RI dapat dihubungi di h_meilani@yahoo.com.

¹ Disunting dalam <http://sukabumikab.bps.go.id/tentang-bps/sejarah-bps/93-statistik-perikanan.html>, diakses 14/2/11.

Dari kondisi laut yang luas tersebut salah satu sumber daya alam yang dapat dihasilkan adalah ikan. Ikan merupakan elemen penting dalam menunjang pasokan makanan manusia, menyumbang sekitar seperlima dari seluruh protein hewani dalam diet manusia. Sekitar 1 miliar orang mengandalkan ikan sebagai sumber protein utama mereka, dan yang menarik adalah produk ikan di dunia jauh lebih besar dari produksi global unggas, daging sapi atau babi. Permintaan yang tinggi untuk produk perikanan telah menyebabkan eksploitasi di laut².

Bisnis sektor perikanan tangkap tahun 2010 di Indonesia dinilai sukses. Total potensi produksi perikanan Indonesia sekitar 65,1 juta ton/tahun berasal dari sumberdaya ikan laut 6,5 juta ton/tahun, sumberdaya ikan perairan umum (danau, waduk, sungai, dan rawa) sebesar 0,9 juta ton/tahun, budidaya laut (*mariculture*) sebesar 47 juta ton/tahun, budidaya tambak sebesar 5 juta ton/tahun, dan budidaya perairan tawar sebanyak 5,7 juta ton pertahun. Sedangkan China kini sebagai produsen perikanan terbesar di dunia, total produksi 56 juta ton pada tahun 2010 dan hanya memiliki potensi produksi tidak lebih dari 60 juta ton/tahun³. Bila dibandingkan dengan potensi lestari ikan laut dunia sekitar 85,33 juta ton, maka potensi lestari ikan laut sekitar 7,5 % terdapat di wilayah Indonesia (Lihat tabel 1 pada lampiran 1).

Angka produksi mencapai 5,384 juta ton naik 5,42%. Nilai produksi perikanan tangkap tahun 2010 mencapai Rp 61,24 triliun, naik 13,56% dari tahun 2009 (Rp 53,93 triliun). Target nilai produksi tahun 2010 adalah Rp 87,275 triliun. Jumlah ekspor meningkat dari 287.702 ribu ton menjadi 653.514 ribu ton. Pada 2009, nilai ekspornya adalah Rp 603.403 juta dan pada 2010 menjadi Rp 1,485 miliar⁴. Menurut laporan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai produksi perikanan budidaya naik 16,34% yakni dari 4.708.565 ton pada tahun 2009 menjadi 5.478.062 ton pada 2010⁵.

² B.P. Resosudarmo, Subiman, N.I., dan B. Rahayu, 2000, *The Indonesian Marine Resource: An Overview of Their Problems and Challenges*, *The Indonesian Quarterly*, 28(3): 346.

³ Tamsil Linrung, *Kontribusi Perikanan dalam Menunjang Kedaulatan Pangan Indonesia*, disampaikan dalam Seminar "menuju Indonesia Berdaulat Pangan", 2011.

⁴ "Nilai Produksi Perikanan RI capai Rp 61 triliun di 2010", <http://www.detikfinance.com/read/2011/01/06/164402/1540782/1036>, diakses 10/2/11.

⁵ "Produksi Perikanan belum merata", disunting dalam http://www.trobos.com/show_article.php?rid=12&aid=2717, diakses 28/2/11.

Ikan merupakan sumber protein hewani yang tingkat konsumsinya semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya jumlah populasi dunia dan semakin meningkatnya kesadaran untuk hidup sehat. Bila dilihat dari sisi konsumsinya penduduk Indonesia pada tahun 2010, terjadi kenaikan konsumsi ikan sebanyak 4,78% dibanding 2009. Pada 2009 konsumsi makan ikan 29,08 kilogram per kapita per tahun, Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2010 ini, konsumsi ikan menjadi 30,47 kilogram per kapita per tahun. Data lembaga PBB yang membidangi masalah pangan (FAO) menyebutkan konsumsi ikan Indonesia mendekati 30 kg per kapita per tahun, dibandingkan dengan negara Malaysia, Thailand, dan Singapura yang tingkat konsumsi ikannya sudah melebihi angka 40 kg per kapita per tahun⁶. Data tersebut menggambarkan kebutuhan produksi perikanan untuk konsumsi masyarakat maupun bahan baku industri pengolahan terus meningkat.

Tabel 1. Tren Konsumsi Ikan Per Kapita, Tahun 2001-2010

Tahun	Konsumsi Ikan (Kg/Kapita)
2001	21,78
2002	22,43
2003	23,11
2004	23,80
2004	23,80
2005	24,51
2006	25,25
2007	26,01
2008	26,79
2009	27,59
2010	28,42

Sumber: BPS (2004)

Konsumsi ikan pada masa mendatang akan diperkirakan akan meningkat seiring dengan peningkatan kesejahteraan dan kesadaran masyarakat akan arti penting nilai gizi produk perikanan bagi kesehatan dan kecerdasan otak manusia. Peningkatan konsumsi ikan per kapita, memiliki korelasi dengan pendapatan per kapita suatu negara. Hal ini disebabkan oleh kemampuan daya beli masyarakat terhadap produk perikanan

⁶ "Menggali Potensi Perikanan Budi Daya", disunting dalam <http://koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=72362>, diakses 10/2/11.

tergantung pada tingkat pendapatannya. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin besar peluang untuk mengkonsumsi produk pangan berprotein tinggi seperti ikan dan produk hasil laut lainnya⁷.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Potensi yang di miliki oleh sumber daya perikanan laut Indonesia
2. Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya perikanan laut di Indonesia
3. Kebijakan apa saja yang telah dilakukan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya perikanan laut di Indonesia untuk menunjang ketahanan pangan di Indonesia.

II. KERANGKA PEMIKIRAN

A. Ketersediaan Suplai untuk Memenuhi Permintaan dalam Negeri

Pengertian pangan⁸ adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman. Ketahanan pangan⁹ adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Pengertian mengenai ketahanan pangan tersebut mencakup aspek makro, yaitu tersedianya pangan yang cukup; sekaligus aspek mikro, yaitu tersedianya pangan setiap rumah tangga untuk menjalani hidup yang sehat dan produktif¹⁰.

⁷ Bappenas, *Perspektif Strategi Pembangunan Perikanan Indonesia (2005-2010)*, 2005.

⁸ Undang-Undang Pangan No. 7 1996 pasal 1 ayat 1.

⁹ Undang-undang Pangan No. 7 tahun 1996 pasal 1 ayat 17.

¹⁰ Mudrajad Kuncoro, *Ekonomika Indonesia: Dinamika Lingkungan Bisnis di Tengah Krisis Global*, UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2009.

FAO, sebagai badan internasional yang menangani masalah pangan kini beranggotakan 193 Negara. Saat ini, masih ada 1,02 milyar umat manusia yang hidup dalam kelaparan. FAO harus berupaya agar masalah kelaparan dapat dihapuskan, serta ketahanan pangan dunia harus semakin diperkuat. Pangan dapat berarti produksi hasil pertanian, peningkatan hasil perikanan, konservasi dan pengelolaan hutan, penanganan permasalahan perubahan iklim, program energi terbarukan dan permasalahan pengelolaan sumberdaya alam.

Berdasarkan definisi ketahanan pangan dari FAO¹¹ (1996) dan UU RI No. 7 tahun 1996 tentang pangan, yang mengadopsi definisi dari FAO, ada 4 komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan yaitu:

1. Kecukupan ketersediaan pangan;
2. Stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun;
3. Aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan; serta
4. Kualitas/keamanan pangan, kualitas/keamanan jenis pangan yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi. Ukuran kualitas pangan seperti ini sangat sulit dilakukan karena melibatkan berbagai macam jenis makanan dengan kandungan gizi yang berbeda-beda, sehingga ukuran keamanan pangan hanya dilihat dari 'ada' atau 'tidak'nya bahan makanan yang mengandung protein hewani dan/atau nabati yang dikonsumsi.

Ketahanan pangan yang dihasilkan oleh suatu sistem pangan yang terdiri atas tiga sub sistem, yaitu ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk, distribusi pangan yang lancar dan merata, dan konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi dan kaidah kesehatan. Pokok-pokok kebijakan ketahanan pangan yang harus mendapat prioritas dalam pembangunan jangka panjang yaitu¹²:

1. Mengembangkan sistem pengaturan perdagangan pangan yang adil,
2. Melakukan pengendalian konversi lahan,
3. Meningkatkan produktivitas usaha pangan,

¹¹ Lihat di Ketahanan Pangan Rumah Tangga Di Perdesaan: Konsep dan Ukuran, disunting dalam <http://www.ppk.lipi.go.id/informasi/publikasi/framePub.asp>, diakses 14/3/11.

¹² Mudrajat Kuncoro, *Opcit.*

4. Peningkatan pengelolaan konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan berimbang,
5. Meningkatkan mutu dan keamanan pangan,
6. Melakukan antisipasi terhadap dinamika perubahan iklim dan sumberdaya air,
7. Meningkatkan pengelolaan pertumbuhan penduduk,
8. Mengembangkan aliansi solidaritas masyarakat mengatasi kerawanan pangan.

B. Ekonomi Sumber Daya Terbarukan: Perikanan

Perbedaan yang mendasar dari sumber daya terbarukan dengan yang tidak terbarukan adalah ada atau tidaknya proses reproduksi (atau reproduksi secara biologis). Pada sumber daya tidak terbarukan misalnya, satu unit ekstraksi saat ini berarti satu unit ekstraksi tersisa untuk masa mendatang. Pada sumber daya terbarukan kondisi tersebut tidak berlaku karena adanya proses pertumbuhan.

Ikan merupakan salah satu komoditi yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Perikanan, seperti halnya sektor ekonomi lainnya merupakan salah satu aktifitas yang memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan suatu bangsa. Sebagai salah satu sumber daya alam yang bersifat dapat diperbaharui (*renewable*), pengelolaan sumber daya ini memerlukan pendekatan yang bersifat menyeluruh dan hati-hati. Pada mulanya pengelolaan sumber daya ikan didasarkan pada faktor biologis semata, dengan pendekatan yang disebut *Maximum Sustainable Yield* (tangkapan maksimum lestari) atau disingkat MSY. Namun pendekatan pengelolaan dengan konsep ini belum mempertimbangkan aspek sosial ekonomi pengelolaan sumber daya alam¹³.

Teori lain dikemukakan oleh Gordon-Schaefer, seorang ekonom Kanada yang menyatakan bahwa sumber daya ikan pada umumnya bersifat *open acces*. Tidak seperti pertanian dan peternakan yang sifat kepemilikannya jelas, sumber daya ikan relatif terbuka. Siapa saja bisa berpartisipasi tanpa harus memiliki sumber daya tersebut. Gordon

¹³ Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2004.

menyatakan bahwa tangkap lebih secara ekonomi (*economic overfishing*) akan terjadi pada perikanan yang tidak terkontrol.

C. Peraturan tentang Perikanan

Undang-Undang No. 31 Tahun 2001 ini dikeluarkan atas dasar bahwa perairan yang berada dibawah kedaulatan dan yurisdiksi NKRI dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional mengandung sumberdaya ikan dan lahan pembudidayaan ikan potensial yang menjadi kewajiban pemerintah untuk memanfaatkannya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Pengelolaan sumberdaya ikan dilakukan berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan atau pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya.

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dijelaskan bahwa pengelolaan sumberdaya perikanan mencakup semua upaya termasuk proses yang terintegrasikan dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum perundang-undangan dibidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati¹⁴.

Namun UU No. 31 Tahun 2001 tentang Perikanan dianggap belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan. Kini sudah ditetapkan sebuah Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang semua kegiatannya berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan.

¹⁴ Ruchyat Deni, *Bahari Nusantara Untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Nasional*, Penerbit: The Media of Social and Cultural Communication, 2009.

D. Definisi Menurut Undang-undang

Berdasarkan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan¹⁵, definisi Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Sedangkan yang dimaksud dengan “jenis ikan” menurut Penjelasan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Pasal 7 ayat (6) adalah:

- a. Ikan bersirip (*pisces*);
- b. Udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya (*crustacea*);
- c. Kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya (*mollusca*);
- d. Ubur-ubur dan sebangsanya (*coelenterata*);
- e. Teripang, bulu babi, dan sebangsanya (*echinodermata*);
- f. Kodok dan sebangsanya (*amphibi*);
- g. Buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya (*reptilia*);
- h. Paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya (*mammalia*);
- i. Rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (*algae*); dan
- j. Biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas, semuanya termasuk bagian-bagiannya dan ikan yang dilindungi.

E. Teori Konsumsi¹⁶

Kegiatan Konsumsi adalah kegiatan berupa pengeluaran seumur hidup. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi konsumsi ikan, yaitu:

- a. Faktor ekonomi, semakin besar tingkat pendapatan suatu rumah tangga akan mempengaruhi tingkat konsumsi suatu kebutuhan khususnya pangan karena bertujuan untuk meningkatkan nilai gizi keluarga. Sedangkan ikan mengandung gizi yang baik untuk kesehatan manusia dengan harga yang terjangkau.

Faktor demografi, dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia maka akan semakin bertambahnya tingkat konsumsi secara menyeluruh, walaupun pengeluaran rata-rata per orang atau per keluarga relatif rendah. Pengeluaran konsumsi suatu negara akan sangat

¹⁵ Disunting dalam <http://sukabumikab.bps.go.id/tentang-bps/sejarah-bps/93-statistik-perikanan-.html?start=1>, diakses 14/2/11.

¹⁶ Lihat “Teori Konsumsi Investasi” Disunting dalam http://www.freewebs.com/nana-sudiana/teori_konsumsi_investasi.doc, diakses 21/3/11.

besar, bila jumlah penduduk sangat banyak dan pendapatan per kapita sangat tinggi. Komposisi penduduk. Pengaruh komposisi penduduk terhadap tingkat konsumsi, antara lain: makin banyak penduduk yang berusia kerja atau produktif (15-64 tahun), makin besar tingkat konsumsi. Sebab makin banyak penduduk yang bekerja, penghasilan juga makin besar; makin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, tingkat konsumsinya juga makin tinggi, sebab pada saat seseorang atau suatu keluarga makin berpendidikan tinggi maka kebutuhan hidupnya makin banyak; makin banyak penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan (urban), pengeluaran konsumsi juga semakin tinggi. Sebab umumnya pola hidup masyarakat perkotaan lebih konsumtif dibanding masyarakat pedesaan. Semakin banyak keluarga yang mengerti pentingnya gizi ikan laut bagi kesehatan dan kecerdasan, maka semakin banyak pula tingkat konsumsi ikan sebagai makanan sumber protein tinggi.

b. Faktor-faktor non ekonomi

Faktor sosial budaya, misalnya berubahnya pola kebiasaan makan, perubahan etika dan tata nilai yang berlaku di masyarakat.

III. PEMBAHASAN

A. Peluang Peningkatan Produksi

Dari data statistik terlihat jumlah produksi perikanan di Indonesia saat ini sekitar 4,8 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut sekitar 78% atau lebih kurang 3,7 juta ton adalah hasil produksi dari sektor perikanan laut. Dari total produksi ikan laut maupun ikan tawar sekitar 4,8 juta ton, hanya 0,6 juta ton yang diekspor ke luar negeri. Pada tahun 1997 sektor perikanan mampu mengumpulkan devisa senilai US\$ 2,05 miliar, atau meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai US\$ 1,9 miliar.

Peningkatan produksi juga dapat dilakukan dengan melakukan riset dan iptek di bidang kelautan dan perikanan, baik itu pengembangan teknik budidaya, pakan, teknik penangkapan yang lebih aman agar diperoleh kualitas dan mutu yang baik. Dalam pelaksanaan ekspor komoditi perikanan, Indonesia mendapat beberapa tantangan antara lain persaingan dari banyak negara lain yang mengeskpor udang dan ikan laut. Produk ikan untuk pasar ekspor harus memenuhi standar kualitas ekspor, dan para eksportir ikan harus mampu memenuhi pesanan dari pembeli di luar negeri, yaitu mampu mengekspor dengan kuantitas dan kualitas produk ikan yang

diminta oleh para pembeli luar negeri. Sisa produksi ikan dikonsumsi di dalam negeri maupun dipakai sebagai ikan umpan atau diolah lagi menjadi tepung ikan, kerupuk, serta produk makanan lainnya. Meskipun jumlah produksi ikan per kapita sekitar 24 kg per tahun berdasarkan data Dirjen Perikanan, jumlah konsumsi ikan per kapita di Indonesia menurut data dari BPS, hanya sekitar 14 kg per tahun¹⁷.

Jumlah penduduk Indonesia sekitar 230 juta orang dan akan terus bertambah menjadikan prospek pasar domestik menjadi semakin cerah, karena produk perikanan yang dikonsumsi oleh konsumen domestik semakin beragam dan terjangkau seiring bertambahnya pengetahuan tentang nilai gizi ikan dan produk perikanan bagi kesehatan dan kecerdasan manusia mendorong daya beli kebutuhan pangan masyarakat akan permintaan ikan segar, ikan hidup, ikan beku, produk berbasis siap masak (*ready to cook*) dan produk siap saji atau siap santap (*ready to serve or to eat*).

B. Kendala Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Meningkatnya jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan gaya hidup masyarakat yang sadar akan kesehatan diharapkan dapat meningkatkan konsumsi ikan oleh masyarakat yang diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan akan ikan laut yang berkualitas. Pada umumnya ikan yang diperdagangkan harus terjaga kesegaran dan kandungan gizinya. Namun ikan sangat mudah mengalami kerusakan, berbagai jenis bakteri dapat menguraikan komponen gizi ikan menjadi senyawa-senyawa berbau busuk dan anyir, seperti indol, skatol, H₂S, merkaptan, dan lain-lain. Beberapa bakteri patogen (penyebab penyakit), seperti Salmonella, Vibrio, dan Clostridium, sering mencemari produk perikanan¹⁸. Untuk mengatasinya diperlukan penyimpanan pada suhu yang rendah karena penyimpanan pada suhu rendah dapat menghambat pertumbuhan mikro organisme. Namun masalah penyimpanan yang masih terkendala, menyebabkan naik turunnya harga ikan hal ini dikarenakan ketercukupan pasokan listrik yang digunakan. Dari perhitungan sementara, untuk

¹⁷ Lihat "Penangkapan Ikan Laut", disunting dalam <http://www.bi.go.id/sipuk/id/?id=4&no=40110&idrb=43501>, diakses 3/3/11.

¹⁸ Lihat "Ikan Air Tawar Kaya Protein dan Vitamin", http://web.ipb.ac.id/~tpg/de/pubde_tknprcss_ikan.php, diakses 2/3/11.

membangun fasilitas *coldstorage* ikan di Pulau Jawa dibutuhkan listrik 500 megawatt, sedangkan di luar Jawa sekitar 250 megawatt. Jika kebutuhan listrik itu bisa segera disediakan, berharap fasilitas pendingin bisa segera dibangun¹⁹. Sementara di Thailand ada *coldstorage* dengan kapasitas 20 ribu ton, sedangkan Muara Baru hanya sekitar 3 ribu ton saja. Masalah yang dialami adalah menurunnya harga hasil tangkapan laut pada saat musim ikan berlimpah, untuk mengatasinya pihak DKP sedang mengkaji perlunya peran Bulog sebagai lembaga penyangga harga sebagaimana fungsinya dikomoditas beras. Masalah penyimpanan (*coldstorage*) menjadi masalah yang serius dalam menjaga mutu ikan agar tidak mudah rusak dan menjaga pasokan ikan dalam negeri. Dengan keterbatasan penyimpanan hasil tangkapan, maka harus segera dijual akibat dari biaya pendistribusian yang mahal sehingga dikhawatirkan tidak dapat berdaya saing.

Kendala lainnya adalah masalah sarana dan prasarana jalan yang belum memadai termasuk infrastruktur pelabuhan dan pusat pendaratan ikan, sumber daya listrik dan bahan bakar minyak yang terbatas. Selain itu fasilitas transportasi yang tidak menunjang akibatnya biaya logistik meningkat dan berdampak pada harga ikan, penangkapan ikan ilegal dan penjualan antar kapal dan pengelolaan perikanan yang belum mapan. Kendala lainnya adalah mengenai pembiayaan oleh lembaga keuangan yang belum maksimal karena bidang produksi perikanan termasuk mengandung resiko yang cukup besar. Untuk memulai usaha dibidang produksi perikanan membutuhkan modal yang tidak sedikit. investasi modal yang besar diperlukan untuk menangkap ikan dengan nilai yang sangat rendah, ini membuat margin menjadi tipis yang artinya bahwa sangat mudah bagi perusahaan perorangan dan industri secara keseluruhan untuk menilai investasi yang tinggi. Karakteristik ini juga berarti bahwa perikanan hanya menguntungkan bila sejumlah besar ikan yang ditangkap, yang dapat mengakibatkan tidak hanya untuk penangkapan yang berlebihan, tetapi juga berdampak pada ekosistem²⁰.

¹⁹ Lihat *Supaya Harga Ikan Tidak Jatuh*, http://www.trobos.com/show_article.php?rid=14&aid=2061, diakses 28/2/11.

²⁰ Becky Mansfield, "Rules of Privatization: Contradictions in Neoliberal Regulation of North Pacific Fisheries", Vol. 94(3):2004. Disunting dalam <http://www.geography.osu.edu/faculty/bmansfield/paper-pdfs/Annals-2004.pdf>

Selain itu muncul konflik dalam pemanfaatan sumber daya kelautan baik itu antara nelayan tradisional dengan nelayan komersial. Konflik ini muncul dikarenakan adanya kesenjangan antara tujuan, sasaran, perencanaan, dan fungsi antara berbagai pihak yang terkait. Perencanaan dari masing-masing sektor sering tumpang tindih dan berkompetisi pada ruang laut yang sama. Tumpang tindih perencanaan dan kompetisi pemanfaatan sumber daya ini memicu munculnya konflik pemanfaatan di wilayah pesisir²¹.

C. Upaya Pemerintah Mengatasi Permasalahan Sumber Daya Perikanan

Pemerintah pusat dengan para pelaku usaha perikanan sebagai mitra kerja dapat bekerjasama dalam menegakkan regulasi penjualan ikan agar tertata. Pelaksanaan aturan-aturan pengelolaan perikanan pantai ternyata masih didominasi oleh peranan lembaga adat, pemimpin informal, masyarakat dan lembaga lokal. Faktor-faktor yang menopang dan mempengaruhi keberadaan sistem tradisional ini adalah kepercayaan dan struktur masyarakat, bentuk peraturan, intensitas dan teknologi penangkapan ikan, struktur pemerintahan desa, dan harga komoditas. Sistem tradisional ini dapat dijadikan dasar bagi pengembangan ko-manajemen perikanan pesisir yang melibatkan masyarakat dan pemerintah²².

Pada tahun 2010 untuk mendukung pengembangan bisnis kelautan dan perikanan, pemerintah Indonesia membentuk Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (BKIPM KKP) yang bekerjasama dengan beberapa asosiasi, di antaranya IOTC (*Indian Ocean Tuna Commission*) dan CCSBT (*Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna*). Fungsi dari BKIPM KKP adalah sebagai lembaga yang memiliki otoritas kompeten yang memberikan sertifikat keluar masuk ikan dan produk perikanan, lembaga penjamin kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil pangan.

Dalam menciptakan pangan sebagai ideologi, perikanan budidaya melakukan kegiatan berupa perbaikan keamanan pangan (*food safety*) dari hulu-hilir, dan pengawasan mutu produk impor dan ekspor perikanan. Para

²¹ S.P. Ginting, *Konflik Pengelolaan Sumber Daya Kelautan di Sulawesi Utara Dapat Mengancam Kelestarian Pemanfaatannya*, Vol 1 (2):2, 1998.

²² Victor P.H. Nikijuluw, "Identification Of Indigenous Coastal Fisheries Management (ICFM) System In Sulawesi, Maluku and Irian Jaya", *Jurnal Pesisir dan Lautan*, Vol. 1(2),40,1998.

pembudidaya harus menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), yaitu pembudidaya akan diberikan sertifikasi hasil penilaian secara obyektif dan transparan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan baik produsen maupun konsumen, dan pada gilirannya akan meningkatkan daya saing produk perikanan budidaya. Sampai dengan tahun 2010, dari sebanyak 650 unit usaha disertifikasi, sebanyak 341 unit usaha yang bersertifikat tersebar di 22 provinsi dalam kategori: Pokdakan (79 unit), Perorangan (130 unit), dan Badan Usaha (132 unit)²³.

Akibat yang ditimbulkan dari implementasi Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China atau CAFTA merugikan sektor pangan, khususnya perikanan. Hal itu disebabkan sejumlah produk perikanan impor terus membanjir pasar domestik²⁴. Beberapa produk ikan impor telah menguasai pasar dalam negeri karena harganya lebih murah di antaranya ikan patin asal Vietnam. Saat ini harga jual ikan patin asal Vietnam Rp. 7.000-Rp. 9.000 per kilogram, sedangkan harga jual ikan patin lokal di tingkat petambak Rp. 11.000 per kg. Sementara dominasi produsen pakan ikan saat ini adalah China, sedangkan di tingkat ASEAN dikuasai oleh Thailand.

Kerjasama dengan beberapa negara tetangga yang berbatasan dengan Samudera Hindia seperti India dalam hal penelitian dan pengembangan bidang kelautan meliputi *marine productivity, marine ecosystem health research and monitoring, climate change joint research and observation, marine resources management and applications*. Selain itu kerjasama juga dilakukan di bidang *coastal and environmental engineering*, serta *hatchery production of Marine ornamental Fishes*. Dengan Sri Lanka akan dilakukan kerjasama dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Samudera Hindia dan mengembangkan budidaya perikanan di daerah pantai khususnya untuk jenis timun laut, rumput laut dan ikan bersirip.

Sejak 10 tahun terakhir, Indonesia semakin gencar tampil di forum-forum perikanan regional dan Internasional. Saat ini, Indonesia adalah anggota aktif dari *the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)*, *Commission for the Conservation of Southern Blue Fin Tuna (CCSBT)*, *FAO*, *APEC*, *South East Asia Fisheries Development Center (SEAFDEC)*, *Network of Aquaculture*

²³ Lihat "Siaran Pers: Perikanan dan Ketahanan Pangan", disunting dalam <http://www.dkp.go.id>, diunduh 28/ 2/11.

²⁴ Disunting dalam <http://.kompas.com/read/xml/2010/04/07/03340657/produk.perikanan.lokal.terancam>, diunduh 28 Februari 2011.

Centre in Asia Pacific (NACA), Asia Pacific Fishery Commission (APFIC), D-8, UNFCCC, WTO, Coral Triangle Initiatives (CTI) and Cooperating Non Member dari the Western and Central Pacific Fishery Commission (WCPFC). Pengaruh Indonesia di badan-badan perikanan Internasional dan Regional semakin tampak²⁵.

Salah satu produk unggulan ekspor yaitu udang diharapkan mengalami kenaikan dengan semakin banyaknya petambak yang membudidayakan udang karena adanya faktor kenaikan harga udang, yaitu untuk jenis vanname Februari ini mencapai rekor tertinggi dalam 10 tahun terakhir yaitu mencapai Rp.50.000-Rp 60.000/kg. Padahal, di waktu normal harga udang paling berkisaran Rp.37.000 - Rp.38.000/kg²⁶. Mahalnya harga udang bila dibandingkan dengan Vietnam dan Thailand menjadi Rp 2.400 per kg dikarenakan mahalannya harga pakan sehingga biaya produksi pun meningkat. Hal itu disebabkan komponen biaya pakan yang mencapai 50 persen dari total biaya produksi.

Komoditas unggulan lainnya yang dimiliki Indonesia adalah ikan tuna (*thynnos*) yang hidup di laut dalam khususnya di Perairan Indonesia bagian timur meliputi Laut Makasar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Laut Arafuru, dan Laut Papua. Potensi produksi tuna di Indonesia hampir mencapai 1,2 juta ton per tahunnya dan nilai ekspor lebih dari 3,5 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2009²⁷.

Untuk pengiriman produk ikan utuh beku dan segar, kini Indonesia dikenakan tarif nol. Sedangkan Cina mendapatkan tarif bea masuk nol persen untuk pengiriman produk ikan olahan ke Indonesia. Hal itu membuat sulitnya meningkatkan nilai tambah dan semakin ketatnya persaingan antara produk perikanan Indonesia dengan produk perikanan lainnya. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, impor ikan beku dan segar tahun 2007-2009 meningkat hampir dua kali lipat. Tahun 2009, impor ikan beku dan segar 85.566 ton, tahun 2008 sebesar 83.558 ton, dan tahun 2007 hanya sebanyak 42.891 ton. Adapun nilai impor tahun

²⁵ Lihat "Menyuarakan Perikanan Indonesia di Badan Pangan Dunia", [_http://indroyono.info/index.php?option=com_content&view=article&id=7:expressing-indonesias-fishery-at-the-food-a-agricultural-organization&catid=1:news&Itemid=2&lang=id](http://indroyono.info/index.php?option=com_content&view=article&id=7:expressing-indonesias-fishery-at-the-food-a-agricultural-organization&catid=1:news&Itemid=2&lang=id), diakses 3/3/11.

²⁶ Kontan, 24 Februari 2011, hal. 15.

²⁷ "Menilik Potensi Tuna Indonesia", *Harian Ekonomi Neraca*, 3 Maret 2011.

2009 sebesar 65,82 juta dollar AS, tahun 2008 senilai 71,16 juta dollar AS, dan 2007 sebanyak 27,57 juta dollar AS.

Luasnya wilayah perairan dan besarnya potensi perikanan Indonesia membuat negara kita kerap menjadi wilayah favorit oknum *illegal fishing* dan cukup kesulitan dalam pemberantasannya karena sebagian pelakunya adalah mengikutsertakan masyarakat sekitar. Pada saat kepemimpinan Freddy Numberi, salah satu cara untuk mengentaskan *illegal fishing* adalah dengan melakukan pengembangan program klaster perikanan tangkap, yaitu membatasi wilayah pengelolaan atau penangkapan ikan yang wilayah penangkapannya dikelola oleh perusahaan konsorsium tertentu saja (*holding company*). Namun saat ini, Fadel Muhammad selaku Men-KP ingin membuat klaster perikanan berdasarkan satu jenis komoditas di satu daerah, sehingga dapat menjadi produk unggulan di daerah tersebut agar dapat menyatukan industri perikanan dan penangkapan dari hulu hingga hilir sehingga diharapkan tidak ada monopoli.

Berpijak pada potensi, maka usaha pemerintah dalam menunjang peningkatan produksi ikan dalam negeri di antaranya adalah:

1. Meningkatkan kebijakan pengelolaan yang berdasarkan “open acces” menjadi “limited acces”. Ijin penangkapan harus berdasarkan kepada “carrying capacity”. Pembatasan perijinan diperlukan dalam rangka menjamin kelangsungan perikanan (*sustainability*).
2. Pengembangan armada penangkapan yang modern namun ramah lingkungan dan ditujukan untuk pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan ZEEI. Hal ini penting untuk mengantisipasi agar sumber daya perikanan di perairan ZEEI tidak dieksploitasi oleh nelayan asing.
3. Pengawasan di wilayah perairan melalui patroli laut sehingga keamanan dari kegiatan penangkapan maupun kegiatan lain yang merugikan dan dapat mengancam potensi yang ada di perairan Indonesia dapat diketahui dan diantisipasi.
4. Penyuluhan dan peningkatan keterampilan nelayan, petani ikan dan masyarakat. Penyuluhan bertujuan agar para nelayan, petani ikan dan masyarakat mau menggunakan teknologi maju namun ramah lingkungan.
5. Pengadaan modal kerja/kredit dengan persyaratan mudah dan ringan, sehingga nelayan dan petani ikan dapat mengembangkan usahanya yang kemudian akan menambah produksinya.
6. Pembangunan prasarana dan sarana perikanan seperti pelabuhan, tempat pengisian BBM, penyediaan air bersih, dan sebagainya.

D. Faktor-Faktor yang Menentukan Harga Ikan

Produk perikanan yang berdaya saing tinggi membutuhkan kualitas dan keamanan produk terjamin, harga yang bersaing, dan tersedianya pasokan (*supply*) yang berkelanjutan namun juga ikut menjaga lingkungan ekosistem. Peningkatan produksi ikan diharapkan sejalan dengan peningkatan konsumsi domestik. Peluang untuk memasarkan ikan di Indonesia maupun di luar negeri sangat baik. Faktor elastisitas harga ikan relatif rendah, yaitu 1,06, berarti permintaan ikan dari para konsumen akan menurun sedikit, yaitu 0,6% bilamana harga jual ikan naik 1%²⁸. Harga ikan dihitung oleh Dinas Perikanan di masing-masing pelabuhan perikanan. Harga ditetapkan melalui sistem lelang di setiap Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang diolah oleh Dinas Perikanan maupun KUD Mina bekerjasama dengan Dinas Perikanan. Perkembangan harga pembelian ikan oleh para pedagang di TPI, menunjukkan trend yang meningkat pada periode beberapa tahun sampai sekarang. Harga beli di TPI berfluktuasi berdasarkan hasil penangkapan dari bulan ke bulan maupun musim penangkapan ikan.

Untuk menciptakan harga yang kompetitif, pemerintah bersama dengan pihak industri bekerja sama dalam pengembangan teknologi pengolahan ikan, agar mutu dari produk ikan terjamin dari hulu hingga hilir (produk akhir). Beberapa negara pengimpor mengeluarkan ketentuan yang sifatnya melindungi konsumen; misalnya *Quality Management Programe* (QMP) di Canada, *ISO-9000 Organization for International Standard*, dan *Hazard Analysis Critical Control Points* (HACCP) yang di terapkan di Amerika Serikat.

Pada tabel 1 terlihat peningkatan produksi perikanan di tahun 2008 di semua subsektor budidaya laut, tambak, kolam, karamba, jaring apung, dan sawah.

²⁸ *Ibid.*

Tabel 2. Produksi Perikanan menurut SubSektor, Tahun 2006-2008 (Ton)

PRODUKSI	2006	2007	2008
Budidaya Laut	1.365.922	1.509.528	1.966.002
Tambak	629.613	933.832	959.509
Kolam	381.948	410.373	479.167
Karamba	56.199	63.929	75.769
Jaring Apung	143.252	190.893	263.169
Sawah	105.673	85.009	111.584

Sumber: www.bps.go.id, 2009

Pada tabel 2 terlihat produksi hasil perikanan laut tangkap mengalami penurunan sedangkan perairan umum mengalami kenaikan hal ini disebabkan karena perubahan iklim dan semakin banyaknya kapal penangkap ikan yang beroperasi di perairan Indonesia. Data Kementerian Perikanan dan Kelautan menunjukkan jumlah perusahaan perikanan tangkap domestik pada 2010 mencapai 2.741 dengan jumlah kapal tangkap mencapai 5.417 armada²⁹.

Tabel 3. Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2006-2008 (Ton)

Provinsi	Perikanan Laut			Perairan Umum		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008
SUMATERA	1.216.691	1.343.789	1.420.489	93.217	100.945	299.070
JAWA	914.710	915.155	948.057	42.495	36.369	38.531
BALI & NUSA TENGGARA	269.427	306.983	292.206	2.547	3.261	3.417
KALIMANTAN	326.883	308.822	322.820	120.365	136.324	131.533
SULAWESI	863.852	910.326	934.781	28.332	26.507	14.423
MALUKU	920.628	949.205	783.580	6.965	7.051	7.421
Jumlah	4.512.191	4.734.280	4.701.933	293.921	310.457	494.395

Sumber: www.bps.go.id, 2009

Jumlah perusahaan yang bergerak dibidang perikanan tambak dan laut semakin bertambah karena masih tingginya permintaan dan harga jual ikan yang cukup mahal sehingga masih banyak pengusaha yang tertarik menekuni bidang ini sedangkan di bidang pembenihan dan air tawar

²⁹ "Menilik Potensi Tuna di Indonesia", *Harian Ekonomi Neraca*, 3 Maret 2011.

mengalami penurunan. Jumlah perusahaan di bidang pembenihan menurun hampir 50 persen dari 104 perusahaan pada tahun 2004 menjadi tinggal 51 perusahaan saja pada tahun 2009. Padahal Pembenihan merupakan tolok ukur bilamana produk ikan tersebut memiliki mutu dan kualitas yang telah sesuai standar produksi. Pada perusahaan budidaya perikanan air tawar terlihat tidak stabil, mungkin dikarenakan membutuhkan modal yang tidak sedikit sedangkan untuk mempersiapkan lahan luas yang memiliki sumber air kini cukup sulit selain itu juga ancaman penyakit yang menyerang ikan air tawar yang sangat rentan penyakit sehingga banyak pula perusahaan yang tidak beroperasi lagi.

Tabel 4. Jumlah Perusahaan Budidaya Perikanan (2000-2009*)

Jenis Budidaya	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
Tambak	131	172	174	156	193	91	126	135	145	148
Pembenihan	67	85	85	89	104	30	54	59	54	51
Air Tawar	4	7	7	8	8	4	9	13	7	6
Laut	14	19	19	23	30	22	21	27	22	24
Jumlah	216	283	285	276	335	147	210	234	228	229

*angka sementara

Sumber: www.bps.go.id, 2009

Jumlah perusahaan penangkapan ikan selama kurun waktu 2000-2009 tetap didominasi oleh PMDN yang sejak tahun 2004 mengalami penurunan hingga 59%.

Tabel 5. Jumlah Perusahaan Penangkapan Ikan Menurut Status Permodalan (2000-2009*)

Status Permodalan	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009 *
PMA	16	16	7	8	10	6	4	7	7	8
PMDN	52	52	14	17	22	10	3	4	11	13
Lainnya	75	74	9	9	19	15	20	22	25	20
Jumlah	143	142	30	34	51	31	27	33	43	41

*angka sementara

Sumber: www.bps.go.id, 2009

E. Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Undang-undang dan peraturan yang menjadi landasan hukum dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia antara lain³⁰;

1. UUD RI Tahun 1945 Pasal 33 yang menyatakan bahwa tanah, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat.
2. Konvensi Hukum Laut (*United Nation Convention of Law of the Sea, UNCLOS*) tahun 1982 asal 61, yaitu negara pantai berkewajiban diantaranya: memastikan tidak terjadi eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya perikanan; menjaga agar jangan terjadi akibat negatif dari cara penangkapan tertentu terhadap jenis-jenis kehidupan laut lainnya.
3. *United Nation Fish Stock Agreement* oleh FAO tahun 1995 yang mengamanahkan negara pantai dan negara penangkap ikan jarak jauh di laut lepas (*Distant Water Fishing State, DWFS*) wajib: menerapkan pendekatan kehati-hatian; mempelajari akibat dari penangkapan ikan; menggunakan upaya-upaya konservasi dan manajemen; melindungi kategori stok target; melindungi keanekaragaman organisme; menghindari penangkapan ikan dan kapasitas penangkapan ikan dan kapasitas penangkapan ikan yang berlebih; memperhatikan kepentingan nelayan kecil; melaksanakan upaya konservasi dan manajemen melalui observasi, kontrol dan pemantauan yang efektif, dan lain-lain.
4. *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) oleh FAO tahun 1995 tentang pengelolaan perikanan bertanggung jawab; negara harus mencegah terjadinya penangkapan yang berlebih; kebijakan pengelolaan SDI harus menerapkan pendekatan kehati-hatian (*precautionary approach*); pengembangan dan penerapan alat penangkapan ikan yang selektif dan ramah lingkungan; perlu dilakukan perlindungan terhadap habitat perikanan yang kritis; negara harus menjamin terlaksananya pengawasan dan kepatuhan dalam pelaksanaan pengelolaan.

³⁰ Achmar Mallawa, *Pengelolaan Sumberdaya Ikan Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat*, disunting dalam <http://regional.coremap.or.id/downloads/Materi-pengelolaan.pdf>, diakses 2/3/11.

njutan dan Berbasis Masyarakat, disunting dalam

<http://regional.coremap.or.id/downloads/Materi-pengelolaan.pdf>, diakses 2/3/11.

5. UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan antara lain: (1) Bab I pasal 1 ayat 7: pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati; (2) Bab IV pasal 6 ayat 1 menyatakan, pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan RI dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan, ayat 2 bahwa pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.

Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat, menciptakan daya saing dan *scale of economies* serta meminimalkan dampak lingkungan.

Kebijakan Pembangunan Perikanan dan Kelautan yang diterapkan pemerintah³¹ yaitu:

1. Mengembangkan kapasitas skala usaha nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha kelautan dan perikanan lainnya
2. Mengembangkan perikanan budidaya yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.
3. Memperkuat dan mengembangkan usaha perikanan tangkap nasional secara efisien, lestari, dan berbasis kerakyatan.
4. Mengembangkan dan memperkuat industri penanganan dan pengolahan serta pemasaran hasil tangkapan.
5. Membangun pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat.
6. Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan.

³¹ Ruchyat Deni, *Opcit.* hal. 27.

7. Memperkuat pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
8. Meningkatkan upaya penanggulangan *illegal fishing*.
9. Mengembangkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.
10. Memperkokoh riset dan iptek kelautan dan perikanan.

Kebijakan program perikanan budidaya tetap mengarah pada tiga kebijakan utama untuk meningkatkan produksi yaitu peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan ekspor, dan pemanfaatan sumber daya perikanan. Tiga hal tersebut dirumuskan dengan sinergi dalam kegiatan pemasaran dan investasi³².

Secara umum diakui bahwa sumber utama krisis perikanan adalah buruknya pengelolaan perikanan yang *overcapacity* dan destruksi habitat. Dari kedua fenomena tersebut muncul berbagai penyebab lain, misalnya subsidi yang *massive*, kemiskinan, *overfishing* dan berbagai derifatif lainnya³³.

Kebijakan yang dapat diambil dalam pengelolaan perikanan tangkap untuk pemulihan stok sumberdaya dan usaha perikanan tangkap, sebagai berikut: (1) pergeseran kebijakan perikanan, dari pengelolaan yang beorientasi pada perluasan usaha menuju pada pengelolaan yang berkelanjutan; (2) pengelola perikanan memahami bahwa prinsip 'sumberdaya tidak akan pernah habis', sudah tidak berlaku atau dengan kata lain, 'perluasan usaha penangkapan yang tanpa kontrol tidak akan menguntungkan lagi'; (3) pengelola perikanan menyadari bahwa pemindahan usaha penangkapan dari wilayah yang mengalami tangkapan berlebih ke wilayah lainnya akan memberikan kontribusi terhadap kolapsnya perikanan tangkap setempat, dan; (4) Pergeseran pengelolaan perikanan dari ketergantungan terhadap model MSY menuju pengelolaan berdasarkan pendekatan ekosistem, dimana Kawasan Perlindungan Laut akan memainkan peran cukup penting³⁴.

³² "Perikanan Budidaya Tingkatkan Pemasaran dan Investasi", *Business news*, No. 8082, 2011.

³³ Akhmad Fauzi, Ph. D., "Kebijakan Perikanan dan Kelautan: isu, sintesis dan Gagasan", penerbit Gramedia Pustaka Umum, 2005.

³⁴ D.G.R. Wiadnya, R. Djohani, M.V. Erdmann, A.Halim, M.Knight, Peter J.M, Jos Pet, L. Pet Soede, *Kajian Kebijakan Pengelolaan Perikanan Tangkap Di Indonesia: Menuju*

Untuk wilayah pemanfaatan sumberdaya perikanan sudah *overfishing* perlu dilakukan upaya: (1) reposisi nelayan melalui pengembangan mata pencaharian alternatif atau melakukan program transmigrasi nelayan ke daerah-daerah yang masih *underfishing*; dan (2) mengurangi tekanan terhadap sumberdaya dengan melakukan *restocking*, mengurangi trip dan atau menerapkan musim tutup penangkapan (*closed season*) untuk waktu-waktu tertentu³⁵.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977mil antara Samudera Hindia dan Samudra Pasifik. Apabila perairan antara pulau-pulau itu digabungkan, maka luas Indonesia mencapai 5.180.053 km² yang terdiri dari 1.922.570 km² berupa daratan dan 3.257.483 km² berupa lautan. Jika dibandingkan antara luas daratan dan lautan, maka luas lautan di Indonesia mencapai 62% dari total wilayah Indonesia sedangkan luas daratan hanya 37% dari total wilayah Indonesia. Dari kondisi laut yang luas tersebut salah satu sumber daya alam yang dapat dihasilkan adalah ikan. Ikan merupakan elemen penting dalam menunjang pasokan makanan manusia, menyumbang sekitar seperlima dari seluruh protein hewani dalam diet manusia. Sekitar 1 milyar orang mengandalkan ikan sebagai sumber protein utama mereka, dan yang menarik adalah produk ikan didunia jauh lebih besar dari produksi global unggas, daging sapi atau babi. Permintaan yang tinggi untuk produk perikanan telah menyebabkan eksploitasi di laut. Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan.

Beberapa kendala yang timbul dalam mengelola sumberdaya perikanan diantaranya terkait masalah penyimpanan (*cold storage*), penyediaan sarana dan prasarana jalan yang belum memadai termasuk infrastruktur pelabuhan dan pusat pendaratan ikan, sumber daya listrik dan

Pembentukan Kawasan Perlindungan Laut, Jurnal Ilmu Perairan dan Perikanan Indonesia (JIPPI), disunting dalam <http://ijonline.net/index.php/JIPPI>, diakses 22/3/11.

³⁵ Ruchyat Deni, *Opcit*

bahan bakar minyak yang terbatas. Selain itu fasilitas transportasi yang tidak menunjang mengakibatkan biaya logistik meningkat dan berdampak pada harga ikan, penangkapan ikan ilegal dan penjualan antar kapal dan pengelolaan perikanan yang belum mapan. Kendala lainnya adalah mengenai pembiayaan oleh lembaga keuangan yang belum maksimal karena bidang produksi perikanan termasuk mengandung resiko yang cukup besar.

Dalam menciptakan pangan sebagai ideologi, perikanan budidaya melakukan kegiatan berupa perbaikan keamanan pangan (*food safety*) dari hulu-hilir, dan pengawasan mutu produk impor dan ekspor perikanan.

Peluang pengelolaan produk ikan segar dan olahan masih terbuka lebar, dengan perbaikan regulasi dan kemudahan bagi para pengusaha/calon pengusaha baik itu dalam memperoleh modal maupun pengurusan dokumen sehingga diharapkan tidak ada lagi *illegal fishing*. Dalam melakukan bisnis ini pemerintah maupun swasta harus memperhatikan keberlangsungan jenis dari ikan yang ditangkap dengan memperhatikan penggunaan alat tangkap dan melakukan budidaya dibidang perikanan. Sehingga peningkatan tidak hanya dalam pengelolaan produksi ikan namun juga memperhatikan ketersediaan populasi ikan agar selalu terjaga untuk menunjang ketersediaan pangan di Indonesia. Pemerintah pusat dapat memberikan insentif untuk para pengusaha yang ingin membangun perikanan, serta upaya peningkatan pengendalian produksi mulai dari penegakan peraturan, selektifitas alat tangkap, modifikasi armada penangkapan ikan, pendalaman metode penangkapan, sertifikasi awak kapal sesuai aturan, optimalisasi fungsi prasarana dan kekuatan kelembagaan (koperasi) khusus pengusaha ikan maupun nelayan.

Peningkatan produksi juga dapat dilakukan dengan melakukan riset dan iptek dibidang kelautan dan perikanan, baik itu pengembangan teknik budidaya, pakan, teknik penangkapan yang lebih aman agar diperoleh kualitas dan mutu yang baik. Untuk menjamin keberlangsungan produksi ikan laut dan ketersediaan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri maka perlu dilakukan pengembangan perikanan melalui hasil budidaya sehingga tidak tergantung pada musim tangkap. Pengembangan perikanan hasil budidaya dapat menyerap tenaga kerja, mendorong perluasan dan kesempatan kerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui terbukanya kesempatan investasi dan mengentaskan kemiskinan.

B. Rekomendasi

Perubahan harus menyentuh teknologi, tatanan sosial, sikap mental, kelembagaan, tatanan ekonomi dan politik. Sehingga potensi ekonomi kelautan dapat sebesar-besarnya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sertifikasi produksi ikan dan produk olahannya diharapkan tidak hanya untuk produk ekspor saja tapi berlaku untuk produk perikanan dan olahannya dari luar negeri harus sesuai dengan standar yang berlaku karena standarisasi dan sertifikasi berperan penting dalam mengurangi perbedaan pandangan terhadap kualitas dan representasi dari produk perikanan yang diperdagangkan.

Koordinasi dari pemerintah dan kemudahan berinvestasi diharapkan dapat menumbuhkan minat wirausaha dalam bidang budidaya perikanan. Misalnya, kemudahan dalam hal pembiayaan, distribusi hasil produksi, keterjangkauan harga pakan, pengaturan harga ikan agar tidak jatuh. Selain itu pengembangan dibidang perikanan dapat meningkatkan penerimaan dan devisa negara, dengan didukung peningkatan mutu, nilai tambah dan daya saing produk perikanan.

Lampiran 1

Tabel 1. Estimasi Potensi Sumberdaya Ikan Pada Masing-Masing Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, 2010 (dalam ribu ton/tahun)

Kelompok Sumberdaya Ikan	Selat Malaka		Samudra Hindia		Laut Cina Selatan	Laut Jawa	Selat Makasar - Laut Flores	Laut Banda	Teluk Tomini - Laut Seram	Laut Sulawesi	Samudera Pasifik	Laut Arafuru - Laut Timor	Total
	WPP	WPP	WPP	WPP									
Ikan Pelagis Besar	571	572	164.8	201.4	66,1	55.0	193.6	104.1	106.5	70.1	105.2	50.9	1149.6
Ikan Pelagis Kecil	147.3	315.9	210.6	210.6	621.5	380.0	605.4	132.0	379.4	220.9	153.9	468.7	3.625.7
Ikan Demersal	82.4	68.9	66.2	334.8	375.2	87.2	87.2	9.3	68.8	24.7	30.2	284.7	1452.5
Udang Penaid	11.4	4.8	5.9	11.9	11.4	11.4	4.8		0.9	1.1	1.4	44.7	98.3
Ikan Karang konsumsi	5.0	8.4	4.5	21.6	9.5	32.1			12.5	44.1	8.0	3.1	145.3
Lobster	11.4	0.6	1.0	0.4	0.5	0.7	0.7	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	4.8
Cumi-cumi	1.9	1.7	2.1	2.7	5.0	3.9	3.9	0.1	7.1	0.2	0.3	3.4	28.3
Total Potensi (1000 ton/tahun)	276.0	565.2	491.7	1059.0	836.6	929.7	278.0	595.6	333.6	299.1	855.5	6520.1	

Sumber: KKP, 2010

Daftar Pustaka

Buku:

- Akhmad Fauzi, *Kebijakan Perikanan dan Kelautan: Isu, Sintesis dan Gagasan*, Penerbit Gramedia Pustaka Umum, 2005
- Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Iban Sofyan, *Manajemen Risiko*, Penerbit Graha ilmu, 2005.
- Mudrajad Kuncoro, *Ekonomika Indonesia Dinamika Lindkungan Bisnis di Tengah Krisis Global*, UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2009.
- Ruchyat Deni, *Bahari Nusantara Untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Nasional*, Penerbit: The Media of Social and Cultural Communication, 2009.
- KADIN, *Butir-Butir Pemikiran Perdagangan Indonesia 2009-2014: Nasionalisme Dalam Era Perdagangan Bebas*, 2009. Diunduh http://www.mudrajad.com/upload/Buku%20Kadin_Bab%20V_Peningkatan%20Daya%20Saing.pdf, tanggal 22 Maret 2011.
- Bappenas, *Perspektif Strategi Pembangunan Perikanan Indonesia (2005-2010)*, 2005

Jurnal:

- Becky Mansfield, *Rules of Privatization: Contradictions in Neoliberal Regulation of North Pacific Fisheries*, Vol. 94(3): 578, 2004. Diunduh <http://www.geography.osu.edu/faculty/bmansfield/paper-pdfs/Annals-2004.pdf>.
- Victor P.H. Nikijuluw, *Identification Of Indigenous Coastal Fisheries Management (ICFM) System In Sulawesi, Maluku and Irian Jaya*, Jurnal Pesisir dan Lautan, Volume 1 (2): 40, 1998.
- Resosudarmo, B.P., N.I. Subiman, dan B. Rahayu, *The Indonesian Marine Resource: An Overview of Their Problems and Challenges*, The Indonesian Quarterly, 28(3): 346, 2000.
- S.P. Ginting, *Konflik Pengelolaan Sumber Daya Kelautan di Sulawesi Utara Dapat Mengancam Kelestarian Pemanfaatannya*, Vol 1 (2):2, 1998.

D.G.R. Wiadnya, R. Djohani, M.V. Erdmann, A.Halim, M.Knight, Peter J.M, Jos Pet, L. Pet Soede, *Kajian Kebijakan Pengelolaan Perikanan Tangkap Di Indonesia: Menuju Pembentukan Kawasan Perlindungan Laut*, Jurnal Ilmu Perairan dan Perikanan Indonesia (JIPPI), <http://ijonline.net/index.php/JIPPI>, diunduh tanggal 22 Maret 2011.

Dokumen Resmi:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Website:

<http://www.pusdik.kkp.go.id/index.php/component/content/article/3-news-flash/91-status-tingkat-eksploitasi-sumber-daya-ikan-di-wpp-ri-desember-2010.html>, diunduh 27 Mei 2011.

<http://sukabumikab.bps.go.id/tentang-bps/sejarah-bps/93-statistik-perikanan-.html>, diunduh 14 Februari 2011.

<http://www.detikfinance.com/read/2011/01/06/164402/1540782/1036/nilai-produksi-perikanan-ri-capai-rp-61-triliun-di-2010>, diunduh pada 10 Februari 2011.

http://www.trobos.com/show_article.php?rid=12&aid=2717, Produksi Perikanan belum merata, diunduh 28 Februari 2011.

<http://koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=72362> diunduh 10 Februari 2011.

<http://kabar.in/2009/indonesia-headline/rilis-berita-depkominfo/06/07/tahun-2010-ue-berlakukan-sertifikasi-produk-perikanan-tangkap.html>, diunduh 10 Februari 2011.

<http://www.dkp.go.id>, Siaran Pers: Perikanan dan Ketahanan Pangan, diunduh 28 Februari 2011.

<http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/07/03340657/produk.perikanan.lokal.terancam>, diunduh 28 Februari 2010

http://indroyono.info/index.php?option=com_content&view=article&id=7:expressing-indonesias-fishery-at-the-food-a-agricultural-organization&catid=1:news&Itemid=2&lang=id, *Menyuarakan Perikanan Indonesia di Badan Pangan Dunia*, diunduh 3 Maret 2011.

http://web.ipb.ac.id/~tpg/de/pubde_tknprcss_ikan.php, *Ikan Air Tawar Kaya Protein dan Vitamin*, diunduh 2 Maret 2011.

http://www.trobos.com/show_article.php?rid=14&aid=2061, *Supaya Harga Ikan Tidak Jatuh*, diunduh 28 Februari 2011.

http://www.freewebs.com/nana-sudiana/teori_konsumsi_investasi.doc, *Teori Konsumsi Investasi*, diunduh 21 Maret 2011.

Achmar Mallawa, *Pengelolaan Sumberdaya Ikan Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat*, dilihat dalam <http://regional.coremap.or.id/downloads/Materi-pengelolaan.pdf>, diunduh 2 Maret 2011.

Surat Kabar dan Majalah:

Dilaut (Seharusnya Kita Berjaya), *Harian Ekonomi Neraca*, 12 Februari 2011.

Menilik Potensi Tuna di Indonesia, *Harian Ekonomi Neraca*, 3 Maret 2011

Kontan, 24 Februari 2011, hal. 15.

Perikanan Budidaya Tingkatkan Pemasaran dan Investasi, *Business news*, No. 8082:14, 2011.